



Judul : Wacana Penundaan Ganggu Stabilitas
Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Wacana Penundaan Ganggu Stabilitas

Polemik penundaan Pemilu 2024 kembali dimunculkan. Kali ini oleh Wakil Ketua DPR Muhamaim Iskandar. Selain inkonstitusional, ide itu juga akan menciptakan kegaduhan.

JAKARTA, KOMPAS — Dorongan untuk menunda Pemilihan Umum 2024 saat polemik hari pemungutan suara sudah berakhir justru akan menciptakan kegaduhan baru. Pemikiran yang berkonsekuensi pada perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden itu pun cenderung otovirarian dan antidemokrasi sehingga dikawatirkan bisa mengganggu stabilitas politik.

butir-point.

Sebaliknya elite politik dan pejabat publik menghindari wacana tersebut karena bisa terjerumus ke dalam gagasan dan praktis politik yang inkonstitusional. Para elite juga sebaiknya menghindari praktik kultus politik (*political cult*) terhadap presiden dan wakil presiden yang mengarah pada perkembangan gagasan penundan pemilu.

"Kala wacana seperti itu terus berkembang akan membuka kontroversi dan kegaduhan politik dan sosial baru di ruang publik. Jelas itu tidak kondusif di tengah usaha pemulihian negara dari pandemi Covid-19 dan dampaknya," kata Guru Besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maulana) di Malang, Jawa Timur, Selasa (12/10/2021).

Wacana ini sebelumnya dilontarkan Menteri Investasi/Kerja Badan Koordinasi Per-

mi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi *freeze* (pembekuan ekonomi) untuk menghentikan stagnasi selama dua tahun masa pandemi," kata Muhammin.

Tak percaya demokrasi

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Publik Biarlah, I

Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor berpandangan, usulan penundaan pemilu ataupun perpan-

jangka pemerintahan berangkat dari pola pikir otoritarian. Usulan itu secara implisit menyiratkan ketidakpercayaan pada proses demokrasi. Sebab, demokrasi dianggap menjadi ancaman dan menimbulkan instabilitas ekonomi. Padahal, sejauh ini Indonesia telah berpengalaman menggali pikiran

Di sisi lain, proses politik telah berjalan dan tanggal pe-

Firman mempertanyakan mungutan suara Pemilu dan landasan empiris penundaan Pilkada 2024 juga sudah ditetapkan. Tanggal pemungutan

sebut. Pasalnya, tidak ada yang bisa menjamin dalam satu atau dua tahun mendatang momen- tum ekonomi akan lebih baik. Konstitusi juga mengam- natkan pemilu digelar lima ta- sung sekali. Selain menjamin ke- stabilitan politik, hal ini juga mem- pastikan bahwa setiap lima ta- sung ada pemilu yang adil dan transparan. Selain itu, pemilu yang adil dan transparan akan mem- pastikan bahwa hasil pemilu benar-benar repre- sentatif dan akurat. Dengan demikian, konstitu- si ini akan memberikan stabilitas politik yang diperlukan untuk mengembangkan ekonomi dan mem- pertahankan demokrasi.

nurut Firman, sudah kondusif dan tidak ada persoalan dengan sistem politik yang ada. Oleh karena itu, ide penundaan pemilu dianggap tidak baik bagi pengembangan demokrasi Indonesia di masa depan.

Butuh ketenangan
Wacana penundaan pemilu
itu langsung menuai kritik dari

terangung menjadi krisis dan sejumlah partai politik di parlemen. Partai Demokrat, salah satunya. "Demokrat meminta pemerintah dan partai pendukungnya untuk fokus pada upaya pemulihian ekonomi secara serius dan bersungguh-sungguh."

serius dan bersungguh sungguh. Jangan malah membuat gaduh hampir tiap saat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat

Herzaky Mahendra Putra.
Demokrat khawatir, wacana

penundaan pemilu akan menciptakan kegaduhan baru. Energi bangsa juga bakal ter-

kurs dalam perdebatan pro dan kontra penundaan pemilu. Partai besutan presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu pun meragukan gagasan penundaan pemilu merupakan usulan dari para pen-

sa. Sebab, dunia usaha juga membutuhkan kepastian dan ketenangan, bukan kegagalan. Sebelumnya saat w

"Sampai saat ini aturannya pemilu masih lima tahun sekali sehingga kami sudah menyampaikan perbaikan terhadap Pemilu

Lebih jauh, Herzaky mengatakan ide penundaan apakan penyelenggaraan Pemilu 2024," katanya.

gatkan, di penundan pelu justru dapat menjerumuskan Jokowi. Jika usulan itu terlaksana, Jokowi akan dikanggur sebagai pemimpin yang mengabaikan kepentingan sendiri dan oligarki serta meninggalkan demokrasi dan konstitusi. Karangku itu, Demokrat me-

lai catatan peluru yang diimbau pada Juni.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, mengatakan, wacana penundaan pemilu tidak relevan dengan siklus transisi

embang serta demokrasi dan
konstitusi yang terjaga dengan
ik.

KPU tetap bekerja

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, sekalipun muncul usulan-usulan penundaan, KPU tetap bekerja mempersiapkan jelas rujukannya di dalam peraturan perundang-undangan. "Artinya, tidak ada urusannya menunda pemilu dengan alasan ekonomi," katanya.

(REK/SYA/NIA)